



The Role of Philanthropic Institutions in the Clean Water Distribution Program in Gunungkidul Regency

Peran Lembaga Filantropi Dalam Program Penyaluran Air Bersih di Kabupaten Gunungkidul

Lutfi Nur Latipah, Erni Saharuddin*

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

Drought is a natural disaster that cannot be avoided and occurs annually in Indonesia. Data from National Agency for Disaster Countermeasure for the years 2020-2024 indicates that the number of districts/cities affected by drought has shown both increases and decreases, varying each year. Therefore, efforts from both the government and private sectors are necessary to provide clean water programs for the community. Philanthropic institution, such as LAZISMU, are also involved in addressing this issue. The objective of this study is to analyze the implementation of the clean water program by LAZISMU. The research employed a qualitative study with a descriptive analysis approach. The results indicated that there were obstacles in the implementation of the clean water distribution program, such as a lack of communication among various LAZISMU branches in Special Region of Yogyakarta, which led to overlapping clean water distribution in some areas, and the budget allocation by LAZISMU has not yet been sufficient to meet the needs of the entire community. Structured coordination is needed, such as regular meetings among LAZISMU throughout the Yogyakarta prior to distribution, is necessary to ensure effective, targeted, and equitable clean water distribution.

Keywords: drought, clean water, philanthropic institutions

ABSTRAK

Kekeringan merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari dan setiap tahun pasti terjadi di wilayah Indonesia. Data dari BNPB tahun 2020-2024 memberikan gambaran bahwa jumlah wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan mengalami penurunan dan kenaikan bervariasi di setiap tahun. Perlu dilakukan upaya oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam program penyediaan air bersih bagi masyarakat. Lembaga filantropi yaitu LAZISMU turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program penyaluran air bersih oleh LAZISMU. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyaluran air bersih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tidak adanya komunikasi antar beberapa LAZISMU se-DIY yang menyebabkan penyaluran air bersih terputus di beberapa daerah serta pemerataan anggaran oleh

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Sri Juni Woro Astuti

Reviewed by:

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni and RD
Kusyeni

*Correspondence:

Erni Saharuddin

ernisaharuddin@unisayogya.ac.id

Published: 26 Oktober 2025

Citation:

Latipah, L. N., & Saharuddin,
E. (2025). *The Role of
Philanthropic Institutions in
the Clean Water Distribution
Program in Gunungkidul
Regency.*

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 13:2.

doi: 10.21070/jkmp.v13i2.1830

LAZISMU belum dapat menyeluruh untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Perlu dilakukan koordinasi terstruktur seperti rapat rutin antar LAZISMU se-DIY sebelum melakukan distribusi agar penyaluran air bersih menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan merata.

Kata Kunci: kekeringan, air bersih, Lembaga filantropi

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang biasa disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peresmian tertulis dalam Peraturan Presiden Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang pembangunan infrastruktur, yang memberikan pelayanan air minum terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga terdapat dalam SDGs pada pilar ke-6 yaitu untuk memastikan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (Rahmawati, 2022). Pilar tersebut merupakan salah satu pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat pada agenda 2030, dimana agenda didalamnya merupakan bagian dari investasi biasa PBB (Montiel et al., 2021).

Untuk mendukung pencapaian tujuan pada pilar ke-6, telah dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih yang mencukupi terutama bagi daerah yang masih kurang dalam menjangkau infrastruktur air yang baik. Proses penyediaan air yang telah dilakukan memiliki kendala dalam pengelolaannya yang disebabkan oleh keadaan alam yang terjadi di Indonesia. Seperti kekeringan pada bulan Juni-Oktober, keadaan seperti ini dikarenakan adanya perubahan iklim global yang menyebabkan kemarau panjang juga fenomena El-Nino yang menyebabkan curah hujan menurun drastis. Kekeringan merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari dan setiap tahun pasti terjadi di wilayah Indonesia. Kekeringan terjadi ketika sumber daya air seperti yang ditemukan di tanah, sungai, waduk, dan akuifer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia atau lingkungan di sekitarnya (Vicente-Serrano et al., 2022). Dapat dilihat pada Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Grafik 1 berikut ini yang menunjukkan jumlah kenaikan dan penurunan bervariasi pada kekeringan dari tahun 2020-2024 di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Data Kekeringan di Indonesia
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Diakses, 2025)

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatas, memberikan keterangan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan jumlah daerah terdampak kekeringan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 26 daerah, tahun 2021 mengalami penurunan yang terdapat 15 daerah terdampak kekeringan, di tahun 2022 mengalami penurunan kembali dengan jumlah empat daerah, tahun 2023 mengalami kenaikan drastis yang berjumlah 179 daerah terdampak, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali dengan jumlah 54 daerah terdampak. Adanya kenaikan dan penurunan pada angka kekeringan di Indonesia bukanlah semata-mata akibat kondisi cuaca, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor alam, kebijakan tata kelola air, pembangunan wilayah serta kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang dinamis.

Fluktuasi kekeringan tersebut memberikan dampak luas dan serius di berbagai sektor kehidupan. Pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air, dapat menyebabkan ketidakstabilan musim tanam dan menurunnya hasil panen beresiko mengganggu ketahanan pangan dan pendapatan petani. Dapat menyebabkan volume air sungai, waduk, dan tanah air banyak mengalami krisis air. Adanya akses air yang terbatas meningkatkan risiko penyakit, pada sektor ekonomi lokal sendiri juga terpukul karena produksi menurun dan biaya hidup meningkat serta mendorong terjadinya migrasi ke kota-kota besar. Kekurangan dan krisis air tidak hanya akan menimbulkan perselisihan antara pasokan dan permintaan di daerah perkotaan dan pedesaan tetapi di dalam negeri maupun luar negeri (Wang et al., 2022). Peranan air bersih bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat (Yasinta, 2023).

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kekeringan juga memberikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Peristiwa alam seperti ini akan berdampak luas jika tidak ditangani dengan baik. Penyelesaian masalah yang dilakukan dengan program seperti penyaluran air bersih. Tindakan yang dilakukan tersebut juga mengacu pada SK Gubernur DIY Nomor 286/KEP/2024 Tentang Penetapan Status Siaga Bencana Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan tersebut diwenangkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang wilayahnya terdampak kekeringan. Adapun data kekeringan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

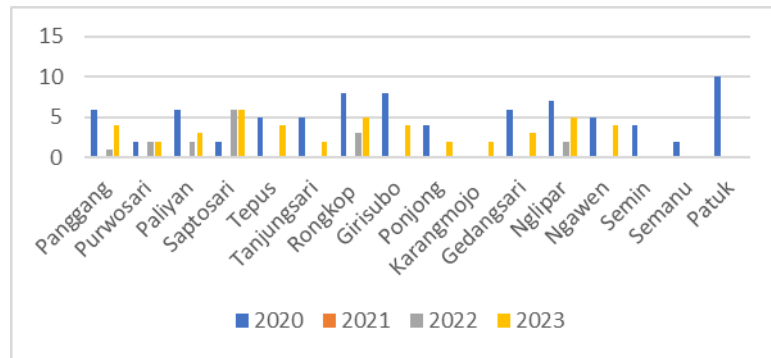
Tabel 1. Data Kekeringan BPBD DIY Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kulon Progo	6 Kapanewon
2.	Bantul	10 Kapanewon
3.	Gunungkidul	16 Kapanewon
4.	Sleman	4 Kapanewon
5.	Kota Yogyakarta	-
Total		36 Kapanewon

Sumber: BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta (2024)

Pada Tabel 1, dapat memberikan penjelasan bahwa kabupaten yang paling banyak mengalami kekeringan yaitu Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 16 kapanewon (kecamatan), Bantul berada di posisi kedua yang berjumlah sepuluh kapanewon, Kulon Progo terdapat enam kapanewon, dan Sleman terdapat empat kapanewon. Sehingga dapat memperlihatkan bahwa kabupaten tertinggi yang mengalami kekeringan yaitu Gunungkidul. Gunungkidul merupakan wilayah administratif di Yogyakarta yang memiliki kebencanaan tertinggi daripada wilayah lainnya. Gunungkidul terkenal dengan daerahnya yang paling parah mengalami kekeringan se-Yogyakarta oleh Mantika et al., (2020) dalam (Irawan, 2022). Kabupaten ini berada di dataran tinggi dengan karakteristik tanah karst yang sangat porus, permeabilitas tinggi, dan drainase cepat sehingga menyebabkan air tidak tersimpan dalam tanah yang sering kali saat musim kemarau mengalami defisit tanah (Irawan, 2022).

Kekeringan yang terjadi di daerah ini menyebabkan sumur warga mengering dan tidak dapat mengeluarkan air. Bencana ini sudah sering dialami oleh masyarakat Gunungkidul karena setiap tahun pasti mengalami kekeringan dalam jangka panjang. Data menunjukkan bahwa rata-rata desa di Kabupaten Gunungkidul mengalami kekeringan ekstrim saat musim kemarau dengan dampaknya yang paling parah dirasakan oleh masyarakat Gunungkidul bagian Selatan yang ketergantungan tinggi terhadap adanya sumber air bersih. Adapun data dari Badan Pusat Statistik Gunungkidul yang memberikan data desa dari tahun pertahun, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Data Kekeringan Desa di Gunungkidul 2020-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Gunungkidul (Diakses, 2025)

Data oleh Badan Pusat Statistik Gunungkidul dari tahun 2020-2023, menyimpulkan bahwa pada tahun 2020 terjadi kekeringan paling tinggi yaitu 80 desa. Kemudian di tahun 2021 tidak ada desa yang terdampak kekeringan ini. Pada tahun 2022 terjadinya kenaikan jumlah kekeringan yang terdapat 16 desa yang mengalami kekeringan. Kemudian tahun 2023 terjadinya kenaikan dengan total keseluruhan desa ada 52.

Tingginya angka kekeringan dan naik turun yang bervariasi di wilayah Gunungkidul sehingga memberikan dorongan bagi lembaga sosial untuk menyalurkan programnya ke daerah terdampak. Seperti lembaga filantropi yang merupakan organisasi yang memiliki berbagai manfaat di bidang sosial, ekonomi maupun pendidikan. Dapat dilihat saat ini banyaknya lembaga filantropi di berbagai daerah yang turut serta dalam penyaluran air bersih seperti BAZNAS, LAZISMU, Lazisnu, Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Dompot Dhuafa. Berkembangnya lembaga ini memiliki manfaat yang banyak terutama untuk memberdayakan masyarakat dengan programnya (Sholikhah, 2021). Dari beberapa lembaga filantropi yang telah disebutkan, penulis berfokus untuk meneliti di Lazis Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU merupakan lembaga organisasi yang didirikan oleh Muhammadiyah yang berfokus untuk memberdayakan masyarakat melalui dana yang dihimpun dan dikelola. LAZISMU menyalurkan air bersih yang diutamakan untuk masjid terdampak baru ke masyarakat.

Penyaluran ini dilakukan dari tahun ke tahun melalui koordinasi untuk proses penyalurannya. Program kemanusiaan ini menunjukkan kepedulian LAZISMU terhadap masyarakat Gunungkidul dalam menangani kekeringan yang berkepanjangan. Melalui program ini, LAZISMU tidak hanya memberikan bantuan darurat tetapi juga membangun penyediaan air yang dapat digunakan oleh tempat umum maupun masyarakat Gunungkidul agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan airnya di waktu sekarang dan masa mendatang. Dalam Pelaksanaan program penyaluran air bersih oleh LAZISMU dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun terdapat kendala dalam pemerataannya, yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga sosial LAZISMU yang menyebabkan penyaluran rangkap di beberapa titik daerah sehingga distribusi air menjadi tidak merata. Fenomena ini menjadi hal yang menarik diteliti mengingat adanya musim kemarau panjang tahunan memberikan dampak signifikan terutama di wilayah Gunungkidul.

Hasil Penelitian sebelumnya dalam jurnal dengan judul Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi Kasus LAZ Harfa Serang) menunjukkan bahwa keberhasilan LAZ Harfa menerapkan strategi yang mencakup edukasi masyarakat, optimalisasi peran fasilitator, melibatkan langsung masyarakat, kerjasama dengan berbagai pihak, serta kemitraan dengan lembaga lain untuk memperkuat program sanitasi dan air bersih relevan dengan penelitian yang dilakukan (Amalia et al., 2020). Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menekankan pada peran lembaga filantropi seperti LAZISMU dalam program penyediaan air bersih melalui penyaluran untuk masyarakat wilayah Gunungkidul

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Mustofa & Rinawati, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang dikaji sesuai dengan keadaan di lapangan. Bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Program Penyaluran Air Bersih oleh LAZISMU di Kabupaten Gunungkidul. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gunungkidul karena lokus tersebut merupakan wilayah dengan karakteristik tanah karst sehingga masyarakat setempat sulit dalam mencapai air ketika terjadinya musim kemarau. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2024 sampai Februari 2025.

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan penelitian karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data (Madhori et al., 2023). Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada ketua LAZISMU, ketua Badan Pengurus Harian (BPH) LAZISMU, wakil BPH penghimpunan dana, ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Purwosari, ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Saptosari, Gedangsari, Panggang, dan Girisubo, serta masyarakat. Jumlah narasumber dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. Narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Prosedur wawancara diawali dengan penyusunan 37 pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara *face to face* dengan mendatangi setiap wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Dokumentasi yang diperoleh berupa data dari LAZISMU Bantul Kota terkait jumlah kecamatan yang menerima air bersih.

Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) mendefinisikan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Analisis data disini menggunakan teknik triangulasi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Laili, 2022; Shafira, 2025). Reduksi data sendiri dapat dilakukan dengan merangkum keseluruhan yang penting agar tidak keluar dari penelitian. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah didapatkan untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan dilakukan secara mendalam dan objektif dengan mempertimbangkan setiap temuan dari data yang diperoleh selama melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan relevansi hasil penelitian dengan rencana konsep sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya angka kekeringan di Kabupaten Gunungkidul memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat karena dapat menyebabkan kebutuhan air bersih terus bertambah namun ketersediaan airnya berkurang. Dengan adanya fenomena tersebut diperlukannya ketersediaan air yang melimpah, akan tetapi masyarakat di wilayah Gunungkidul belum mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri sehingga perlu adanya penyaluran air bersih dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk membahas program penyaluran air bersih yang dilakukan oleh pihak swasta. Penyaluran air bersih ini dilakukan di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena keadaan yang mengalami kekeringan. Penyaluran

ini dilakukan oleh lembaga filantropi LAZISMU Bantul Kota yang berkoordinasi dengan pihak PCM, PRM atau dukuh setempat. Hasil penelitian akan dibahas menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdapat enam indikator yaitu sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial dan ekonomi, dan disposisi pelaksana.

Sasaran Kebijakan

Menurut Subarsono (2005) dalam (Putong & Wahyudi, 2022) sasaran kebijakan dalam implementasi suatu program harus jelas dan terukur untuk dilaksanakan dengan baik. Jika sasaran pada kebijakan tidak jelas, maka dapat terjadi persepsi yang berbeda dari individu satu dengan individu lainnya sehingga dapat memicu konflik antara pelaksana. Untuk itu sebelum dilakukan proses implementasi program ini dibuat sasaran kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan.

Program penyaluran air bersih ini diawali sejak tahun 2017 yang bermula dari adanya permintaan air oleh salah satu kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Mengingat keadaan masyarakat di wilayah tersebut terdampak kekeringan dan memerlukan banyak air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari adanya permintaan oleh masyarakat, kemudian LAZISMU Bantul Kota menyalurkan air bersih di wilayah Gunungkidul yang dilakukan sampai saat ini. LAZISMU Bantul Kota berharap dengan adanya penyaluran air bersih ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah Gunungkidul. Adapun data dari LAZISMU Bantul Kota terkait wilayah yang memperoleh air bersih:

Tabel 2. Data Penyaluran Air Bersih Oleh LAZISMU di Gunungkidul

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Purwosari	23 masjid
3.	Saptosari	1 masjid
4.	Panggung	10 masjid
5.	Girisubo	10 masjid
6.	Gedangsari	14 masjid
Total		46 masjid

Sumber: LAZISMU Bantul Kota (2024)

Dari Tabel 2 menunjukkan data wilayah dan masjid yang memperoleh air bersih dari LAZISMU Bantul Kota yaitu Kapanewon Giricahyo terdapat 23 masjid, Saptosari terdapat satu masjid, Panggang terdapat 10 masjid, Girisubo terdapat 10 masjid, dan di Rongkop terdapat satu masjid. Namun dari temuan yang peneliti dapatkan di wilayah Girisubo langsung diberikan ke masyarakat tidak ke masjid-masjid. Program yang dilakukan tidak hanya penyaluran air bersih, tetapi di beberapa daerah dibangun sumur bor yang akan digunakan oleh masyarakat setempat. Terdapat satu wilayah yang dibangun sumur bor yaitu di Kapanewon Purwosari. Sumur bor tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya, namun pada saat musim kemarau terkadang air dari dalam tanah tidak bisa naik sehingga sumur tersebut tidak difungsikan. Pembuatan sumur bor tidak dapat di berbagai wilayah dilakukan, tergantung jenis tanahnya seperti apa. Untuk menentukan jenis tanahnya juga dilakukan menggunakan alat untuk memastikan bahwa tempat tersebut bisa dibuat sumur bor atau tidak.



Gambar 3. Pembuatan Sumur Bor
Sumber: LAZISMU Pusat (2023)

Terdapat sasaran kebijakan dalam implementasi program penyaluran air bersih yang dilakukan oleh LAZISMU Bantul Kota di Kabupaten Gunungkidul. Agar pelaksanaan program dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan, ditetapkan kriteria sasaran yaitu wilayah yang mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih. Dengan adanya sasaran kebijakan yang jelas, hasil yang diperoleh diharapkan dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Kekeringan biasanya terjadi pada bulan April hingga Juni, dengan puncaknya pada bulan Agustus, meskipun pada bulan September terkadang masih dijumpai kondisi serupa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kekurangan air di wilayah Gunungkidul, memang menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Menurut Ketua BPH LAZISMU Bantul Kota, untuk memastikan penyaluran bantuan dapat tersalurkan dengan baik, di daerah tersebut telah ditunjuk seorang koordinator yang mengatur jalannya pendistribusian.

Sebelum dilakukan penyaluran air bersih, dari pihak LAZISMU Bantul Kota melakukan survei terlebih dahulu terkait bagaimana kondisi yang sebenarnya di lapangan yang akan dilakukan penyaluran air bersih dan juga jumlah tangki yang perlu disalurkan berapa. Survei yang dilakukan pada awal mula pada sekitar tahun 2017/2018, yang kemudian menjadi dasar dimulainya program penyaluran air bersih. Jika sebagian besar lembaga LAZISMU lain berfokus pada wilayah utara, LAZISMU Bantul Kota justru memilih menggarap wilayah selatan yang masih jarang tersentuh bantuan. Melalui langkah tersebut, program penyaluran air bersih dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada penyelenggaraan pertama, kegiatan dimulai dengan penyerahan simbolis berupa satu tangki air yang disertai dokumentasi foto bersama masyarakat dan pihak LAZISMU Bantul Kota. Setelah penyerahan simbolis, tangki-tangki berikutnya disalurkan secara bertahap hingga sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Pada tahap selanjutnya, penyaluran air bersih hanya disalurkan dananya saja, tidak adanya simbolis namun terdapat dokumentasi foto sebagai bukti kegiatan.

Sumber Daya

Definisi oleh Anggara (2014) dalam (Witjaksono & Wibawani, 2023) bahwa sumber daya merupakan salah satu tanda keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dapat dilihat dari sejauh mana potensi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara umum sumber daya disini terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dapat mendukung keefektifan pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi program penyaluran air bersih, dukungan sumber daya manusia (SZM) sangat diperlukan agar tujuan program dapat tercapai dengan baik. SDM merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses pelaksanaan program penyaluran air bersih, yang diawali dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Terdapat delapan pihak yang terlibat langsung, yaitu pengurus LAZISMU Bantul Kota (Ketua LAZISMU, Ketua BPH LAZISMU, dan Bendahara LAZISMU) serta lima pengelola di daerah, yaitu ketua PCM Saptosari, Ketua PCM Girisubo, Ketua PCM Gedangsari, Ketua PRM Giricahyo, Ketua LAZISMU Panggang, dan masyarakat penerima manfaat. Semua pihak tersebut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua LAZISMU Bantul Kota (Bapak S) bahwa partisipasi para pengelola daerah sangat penting karena dana yang disalurkan oleh LAZISMU Bantul Kota perlu dikelola oleh pihak yang berperan di wilayah masing-masing.

Proses penyaluran air bersih yang diawali dari simbolis, hanya satu tangki yang diadakan sedangkan sisanya berupa dana diberikan kepada pihak daerah kemudian dikelola. Mereka yang mencari penyedia truk tangki di wilayah masing-masing dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Pemberian dana dari LAZISMU Bantul Kota untuk penyaluran sebesar kurang lebih Rp1,5 juta hingga Rp3,5 juta kepada pihak-pihak yang dipercaya, seperti PCM, PRM, dukuh, maupun paguyuban setempat. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memesan truk tangki air di daerah masing-masing. Setelah pemesanan truk tangki air, pihak pengelola akan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai jadwal penyaluran air bersih. Jadi LAZISMU Bantul Kota berperan untuk menyediakan dana, sedangkan untuk pengelolaan dan pendistribusian dananya dilakukan oleh pihak wilayah masing-masing agar lebih efektif dan tepat sasaran.



Gambar 4. Seremonial Penyaluran Air Bersih
Sumber: LAZISMU Bantul Kota (2025)

Dukungan finansial penyaluran menjadi aspek penting dalam keberlangsungan program penyaluran air bersih agar dapat memberikan hasil yang optimal. Pengelolaan keuangan dalam program ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena kebutuhan dan biaya di setiap daerah berbeda-beda. Sebelum menyalurkan air, LAZISMU Bantul Kota terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak yang dipercaya mengenai harga per tangki di daerah tersebut serta jumlah tangki yang dibutuhkan. Ketua BPH LAZISMU Bantul Kota memberikan keterangan bahwa anggaran biasanya menyesuaikan kondisi setempat wilayah, karena satu daerah dengan daerah yang lain memiliki harga tangki masing-masing, meskipun secara umum ditetapkan oleh LAZISMU sekitar Rp200 ribu per tangki. Namun tetap saja mengikuti variasi harga di lapangan.

Di beberapa wilayah, biaya dapat meningkat karena faktor akses jalan yang sulit sehingga harga satu tangki bisa mencapai Rp250 ribu. Satu tangki berkapasitas 5.000 liter, yang umumnya mampu memenuhi kebutuhan masjid dan masyarakat selama rata-rata kurang lebih 14 hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua LAZISMU Bantul Kota bahwa kondisi medan sangat mempengaruhi biaya, dimana pada wilayah datar harga biasanya berkisar Rp150 ribu-Rp175 ribu, sedangkan pada wilayah dengan akses jalan yang menanjak bisa mencapai Rp250 ribu per tangki. Besaran dana yang disalurkan bergantung pada keputusan dan perencanaan pengelola di lapangan, yang menentukan jumlah tangki yang perlu dibeli serta bagaimana pendistribusiannya. Prinsip utama yang diterapkan yaitu dengan memastikan air bersih dapat menjangkau masyarakat secara merata dan mencukupi kebutuhan harian masyarakat. Oleh karena itu, penyaluran tidak dilakukan secara seragam, melainkan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan spesifik tiap wilayah. Selain itu, evaluasi dan koordinasi rutin juga dilaksanakan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana yang telah disalurkan.

Tabel 3. Jumlah Dana Pemasukan Dan Pengeluaran di LAZISMU Bantul Kota

Tahun	Pemasukan (%)	Pengeluaran (%)
2023	31,62	68,38
2024	32,13	67,87

Dalam pelaksanaan penyaluran air bersih, keterbatasan sumber daya finansial menjadi tantangan utama yang dihadapi. Berdasarkan data, pengeluaran untuk keperluan air bersih lebih besar dibandingkan penerimaan, karena adanya subsidi program saat pelaksanaan. Namun, subsidi tersebut tetap belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, sebab pendanaan bergantung pada jumlah donasi yang masuk pada waktu tertentu. Setiap donasi yang diterima langsung disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sebagai contoh, dalam satu bulan kebutuhan air menmcapai sekitar 90 tangki, sementara LAZISMU Bantul Kota hanya mampu mendistribusikan sekitar 10 tangki. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 80 tangki yang belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas finansial LAZISMU Bantul Kota belum mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian dengan Bapak S yang merupakan salah satu masyarakat Girisubo, bahwa kebutuhan air bersih di masyarakat sangat banyak sementara bantuan dari lembaga sosial belum mampu untuk mencukupinya.

Untuk mengatasi keterbatasan air tersebut, LAZISMU Bantul Kota berupaya menjalin kerja sama dengan lembaga sosial lainnya untuk menyalurkan air bersih ke wilayah Gunungkidul, serta untuk mengembangkan strategi dalam jangka panjang dengan membangun sumur bor. Namun, biaya pembuatan sumur bor relatif tinggi sehingga memerlukan dana yang lebih besar. Proses penentuan titik pengeboran dilakukan dengan bantuan alar monitor yang terhubung ke geo-satelit, menggunakan kabel sepanjang kurang lebih 50 meter dengan paku pada setiap dua meter untuk mendeteksi keberadaan sumber air. Setelah titik ditemukan, pengeboran dapat dilakukan dengan biaya sekitar Rp600.000-Rp700.000 per meter. Jika kedalaman pengeboran semakin besar, maka dana yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Estimasi biaya awal untuk pembuatan sumur bor mencapai sekitar Rp6 juta, bergantung pada kedalaman, debit air dan kondisi tanah dilokasi pengeboran.

Komunikasi

Komunikasi menurut (Nurlia & R, 2021) merupakan bagian terpenting yang perlu ada dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Jika tidak ada komunikasi yang efektif maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan lancar. Oleh karenanya dalam pelaksanaan program diperlukannya komunikasi yang baik antar pelaksana untuk dapat mencapai keberhasilan.

LAZISMU Bantul Kota melaksanakan koordinasi dengan pihak pengelola dana secara intensif dan terarah melalui satu orang perwakilan yang telah ditunjuk. Mekanisme komunikasi satu pintu ini bertujuan agar proses penyaluran air dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, serta sesuai dengan harapan semua pihak. Dengan sistem tersebut, distribusi air bersih dapat dilakukan secara adil dan merata sehingga tidak ada masyarakat yang mengalami kelebihan pasokan maupun kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, komunikasi yang terstruktur juga mempermudah penyelesaian kendala di lapangan melalui koordinasi yang cepat fan efektif.

Komunikasi yang diawali dari adanya permohonan bantuan air bersih, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi antara LAZISMU Bantul Kota dengan pihak pengelola mengenai jumlah tangki serta biaya yang diperlukan. Dari pihak pengelola juga menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan laporan bahwa dana telah digunakan untuk membeli tangki air dan mendistribusikannya ke masjid maupun masyarakat. Bentuk laporan tersebut umumnya berupa proposal yang disertai ucapan terima kasih kepada para donatur serta dokumentasi penyaluran seperti foto-foto kegiatan yang dibagikan lewat WhatsApp. Dengan adanya laporan ini, para donatur dapat melihat hasil penyaluran bantuan yang bersumber dari dana mereka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap program dan juga LAZISMU. Laporan tersebut sekaligus menjadi wujud pertanggungjawaban atas pengguna dana yang diterima.

Penyampian informasi kepada masyarakat, dibuat pengumuman resmi mengenai jadwal penyaluran air bersih wilayah tertentu. Pengumuman ini biasanya disampaikan melalui media komunikasi lokal seperti grup WhatsApp RT, pengeras suara masjid, atau papan informasi desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan menerima bantuan dengan tertib. Bantuan air bersih yang masuk diutamakan untuk kebutuhan masjid, namun jika masih terdapat sisa air baru disalurkan untuk masyarakat setempat atau wilayah disekelilingnya yang masih sangat membutuhkan air.

Meskipun penyaluran air bersih sudah terlaksana dengan lancar, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya koordinasi antara LAZISMU Bantul Kota dengan LAZISMU lain di wilayah DIY. Kondisi ini terkadang menyebabkan penyaluran air bersih tersalurkan double ke wilayah yang sama dari beberapa pihak LAZISMU. Walaupun pihak pengelola di lapangan sudah berusaha untuk meratakan distribusi air bersihnya, tetapi dirasa masih kurang efektif karena pengelola harus mendistribusikan ulang ke wilayah berbeda secara terpisah. Yang menyebabkan tidak seimbang masyarakat dalam menerima air bersih yang disalurkan, misalnya ada wilayah yang sudah menerima air sekitar 80% sementara di wilayah lain baru menerima 30%. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga agar distribusi air bersih dapat berjalan lebih merata, tepat sasaran, dan tidak saling tumpang tindih.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Fauziah & Arif, 2021) karakteristik agen pelaksana dalam sebuah program perlu diidentifikasi agar hasil yang dicapai optimal. Hal ini meliputi struktur birokrasi, norma dan aturan yang berlaku, serta pola hubungan yang terbentuk di dalam birokrasi. Agen pelaksana sendiri merupakan pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Adapun pihak yang dipercaya biasanya adalah tokoh masyarakat setempat seperti PCM, PRM, dukuh, maupun paguyuban, dengan peran ketua, sekretaris, bendahara, atau tim penghimpunan dana.

Tokoh masyarakat yang telah ditunjuk menjadi pengelola akan berkoordinasi langsung dengan LAZISMU Bantul Kota. Mereka memiliki peran untuk menyampaikan permintaan air bersih dan memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan. Komunikasi detail dilakukan sejak tahap awal, dimulai dari survei hingga proses penyaluran simbolis. Data penerima bantuan juga terus diperbarui setiap bulan, karena jumlah penerima dapat bertambah atau berkurang sesuai kondisi di lapangan.

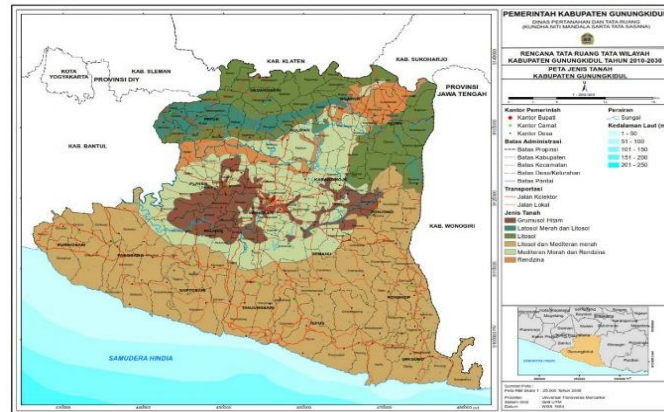
Dalam penyaluran air bersih, pihak pengelola tidak memberikan dana langsung kepada masyarakat penerima. Kebijakan ini diambil agar dana tidak beralih pada kebutuhan yang lain di luar tujuan program. Sebagai gantinya, bantuan disalurkan langsung dalam bentuk tangki air, sehingga manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan awal.

Pemilihan agen pelaksana juga mempertimbangkan kemampuan dalam berkomunikasi dan memahami kondisi lokal. Berdasarkan pengalaman, ketika LAZISMU Bantul Kota berkomunikasi langsung dengan masyarakat, sering muncul kendala karena sebagian warga belum memahami dengan jelas mengenai harga per tangki maupun kondisi distribusi air di wilayah mereka. Oleh karena itu, koordinasi kemudian difokuskan melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti dukuh, ketua PCM, ketua PRM, dan pihak lain yang dinilai lebih menguasai situasi. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh lebih akurat, distribusi lebih tepat sasaran, dan penyaluran bantuan dapat berjalan secara optimal.

Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan program atau kebijakan yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada tujuan kebijakan (Faujiah et al., 2025). Pada indikator ini dapat digunakan untuk menyoroiti bagaimana keadaan sosial dan ekonomi di daerah Gunungkidul, apakah terbantu atau tidak dengan adanya penyaluran air bersih ini. Penilaian ini penting untuk melihat sejauh mana program tersebut memberikan dampak langsung terhadap

kehidupan masyarakat, baik dari segi peningkatan kesejahteraan, pengurangan beban biaya pembelian air, maupun kemudahan akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan adanya air bersih yang disalurkan secara rutin, masyarakat diharapkan tidak hanya merasakan manfaat secara fisik, tetapi juga mendapatkan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi rumah tangga, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.



Gambar 5. Peta Kabupaten Gunungkidul
Sumber. ArcGIS Online (2024)

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.475,15 km², yang mencakup sekitar 46,5 persen dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini sebagian besar terdiri dari perbukitan kapur dan pegunungan, serta berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di selatan. Karakteristik geografis ini menyebabkan Gunungkidul sering mengalami kekeringan, terutama pada musim kemarau. Dari adanya peta tanah tersebut dapat memperlihatkan bahwa karakteristik tanah di wilayah Gunungkidul bagian selatan lebih sering mengalami kekeringan karena memiliki jenis tanah litosol dan mediteran merah, yang dimana tanah ini sulit untuk mengeluarkan air dari dalam tanah.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tercatat sebanyak 776.580 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15-59 tahun), mencapai 474.900 jiwa atau sekitar 61,15 persen dari total populasi. Meskipun demikian, Gunungkidul merupakan satu-satunya kabupaten di DIY yang tidak pernah mengalami demografi, karena jumlah penduduk usia produktif tidak pernah lebih dominan dibandingkan usia non-produktif. Sebagian besar masyarakat tinggal di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses pendidikan dan layanan dasar. Kondisi tersebut menjadikan tantangan tersendiri, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau.

Untuk perekonomian, rata-rata penduduknya bergantung pada pertanian tadah hujan dengan hasil utama berupa singkong yang jumlahnya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan pangan selama musim kemarau karena masyarakat Gunungkidul hanya mengalami panen sekali dalam setahun. Buruknya keadaan tersebut dikarenakan rendahnya perekonomian yang berada di wilayah Gunungkidul. Banyaknya keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih, padahal seharusnya biaya tambahan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti pangan dan pendidikan. Dengan adanya program penyaluran air bersih secara rutin yang diselenggarakan oleh lembaga filantropi khususnya LAZISMU, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung perekonomian masyarakat Gunungkidul.

Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih menjadi kebutuhan yang sangat penting terutama pada saat musim kemarau. Banyak keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli air, bahkan satu keluarga dapat menghabiskan hingga 15 tangki dengan harga sekitar Rp150.000 per tangki. Jadi, selama musim kemarau biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp2,5 juta hanya untuk kebutuhan air. Dengan adanya bantuan air bersih dari LAZISMU Bantul Kota sangat membantu meringankan beban tersebut. Dan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membeli air dapat digunakan untuk kebutuhan pokok lain seperti beras dan kebutuhan sehari-hari.

Selain berdampak pada perekonomian rumah tangga, program ini juga memberikan manfaat sosial. Seperti masjid-masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah masyarakat sangat terbantu dengan adanya ketersediaan air bersih, sehingga pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, air bersih juga mendukung keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan air dalam menjalankan rumah tangga maupun untuk usaha dagangnya, sehingga bantuan ini sangat berperan penting untuk meningkatkan kestabilan perekonomian masyarakat setempat. Seperti hasil wawancara dengan Bapak W, salah satu masyarakat Giricahyo bahwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk jualan. Beliau kesusahan jika tidak ada air bersih, syukur-syukur beli kalau ada uangnya. Kalau tidak ada hanya mengandalkan dari bantuan untuk kebutuhan sehari-hari dan jualan.

Bantuan air bersih tidak hanya berfungsi sebagai solusi terhadap krisis air saat musim kemarau, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga secara luas. Dampaknya tidak terbatas pada kebutuhan domestic, melainkan juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk menjalankan aktivitas dagangnya. Ketika air bersih menjadi beban pengeluaran rutin yang cukup besar, bantuan ini mampu mengalihkan pengeluaran masyarakat ke sektor lain yang lebih produktif. Oleh karena itu, program penyaluran air bersih tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi warga di tengah kondisi alam yang tidak menentu.

Disposisi Pelaksana

Van Meter dan Van Horn dalam (Febriadi, 2019) mendefinisikan bahwa disposisi dalam pelaksanaan program merupakan unsur penting dalam sebuah program yang meliputi pemahaman dan tanggapan oleh pelaksana dalam suatu kebijakan atau program yang dilakukan. Disposisi dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai sikap pelaksana program dalam merespons pihak penerima atau pemanfaat bantuan air bersih. Fokus disposisi yang diteliti terletak pada sejauh mana terdapat persetujuan, dukungan, maupun penolakan terhadap proses penyaluran air bersih di sejumlah daerah. Pemahaman terhadap disposisi pelaksana program menjadi penting untuk mengetahui apakah sikap mereka berkontribusi pada kelancaran implementasi program atau justru berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program penyaluran air bersih, LAZISMU Bantul Kota menunjukkan sikap yang sangat terbuka. Lembaga ini tidak pernah menolak permintaan bantuan air dari wilayah manapun. Setiap pengajuan yang masuk selalu mendapatkan persetujuan, bahkan dalam beberapa kasus pihak LAZISMU Bantul Kota secara proaktif menawarkan bantuan kepada wilayah yang sebelumnya rutin menerima distribusi air bersih namun belakangan jarang mengajukan permintaan. Hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian serta komitmen untuk menjaga kesinambungan distribusi bantuan. Sejalan dengan temuan tersebut, salah satu pengurus LAZISMU Panggang menuturkan bahwa setiap permintaan bantuan masuk selalu diterima, kemudian dibahas bersama pengurus lain untuk diputuskan mengenai wilayah penerima dan jumlah distribusi yang disetujui.

Sikap para pelaksana program, khususnya dari pihak LAZISMU Bantul Kota terlihat sangat responsif dan tanggap dalam menangani permintaan penyaluran air bersih dari masyarakat. Responsivitas ini tercermin dari upaya mereka dalam menyesuaikan jumlah bantuan air bersih dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, yang dihitung berdasarkan permintaan dan kondisi wilayah masing-masing. Selain itu, penyaluran bantuan juga disesuaikan dengan besaran dana yang tersedia dari pada donatur, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas kemampuan anggaran tanpa mengurangi manfaat yang diterima oleh masyarakat. Sebelum penyaluran dilakukan, pihak LAZISMU Bantul Kota terlebih dahulu melakukan diskusi dan koordinasi internal bersama pengurus lainnya untuk menentukan alokasi dana yang akan digunakan serta wilayah yang menjadi prioritas, agar bantuan dapat disalurkan secara adil, merata dan tepat sasaran.

Selain menunjukkan respons yang cepat terhadap setiap permintaan bantuan, pelaksana program dari LAZISMU Bantul Kota juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tujuan jangka panjang program yaitu memastikan akses air bersih yang merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Komitmen ini tampak dari konsistensi mereka dalam menyalurkan bantuan,

meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran atau kendala teknis di lapangan. Lebih dari itu, sikap pelaksana juga tercermin dari fleksibilitas mereka dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat yang sering berubah, misalnya ketika terdapat lonjakan permintaan akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Yang tidak kalah penting, sikap empati dan kepedulian sosial para pelaksana tercermin dari inisiatif mereka untuk menawarkan bantuan ke wilayah-wilayah yang jarang meminta, meskipun sebelumnya menjadi penerima rutin.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program penyaluran air bersih yang sudah memberikan dampak nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Gunungkidul, khususnya saat menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Program ini menunjukkan sikap responsive dan konsistensi pelaksana dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola bantuan. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antarpihak yang menyebabkan terjadinya penyaluran ganda di beberapa daerah, serta keterbatasan sumber daya finansial karena bergantung pada donasi yang tidak menentu.

PENDANAAN

Terima kasih kepada Bapak Ivan Gunawan atas bantuan finansialnya sehingga artikel ini dapat terpublikasikan pada Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENCES

- Amalia, R. Y., Nurwahidin, N., & Huda, N. (2020). Strategi Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih (Studi Kasus LAZ Harfa Serang). In *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6630>
- Faujiah, Sugianor, & Fakhri. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online Pada Kantor Badan Pengelolapajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pajak Restoran). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 612–622.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Febriadi, H. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah. *Administratras Jurnal Ilmu Administratrasli Dan Manajemen*, 3(3), 211–226. <https://doi.org/https://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administratras/article/view/100>
- Irawan, S. (2022). Forecasting Curah Hujan sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2022. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS*, 6(1), 370–376. <http://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/semnas/article/view/2030%0Ahttps://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/2030/1353>
- Laili, K. (2022). Planning in the Village Development Process Based on the Village Law in Ganggangpanjang Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 7(1), 20–24. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v7i1.1705>
- Madhori, Amiludin, Ginanjar Suryatman, A., & Fadli, Y. (2023). Implementation of the Job Creation Law Number 11 of 2020 in the Welfare Sector in Tangerang Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 11(2), 129–137. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1754>
- Mantika, N. J., Hidayati, S. R., & Fathurrohman, S. (2020). Identifikasi Tingkat Kerentanan Bencana Di Kabupaten Gunungkidul. *Matra: Jurnal Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(1), 59–70.
- Montiel, I., Cuervo-Cazurra, A., Park, J., Antolín-López, R., & Husted, B. W. (2021). Implementing the United Nations' Sustainable Development Goals in international business. *Journal of International Business Studies*, 52(5), 999–1030. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00445-y>
- Mustofa, A., & Rinawati, R. (2020). The Quality of Health Service For Elderly Patients: Between Expectations and Reality. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 8(2), 34–43. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i2.1143>
- Nurlia, & R, N. (2021). Implementasi Pengawasan Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Open Defecation Free (Odf) Di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. *Meraja Journal*, 4(2), 121–141. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.171>
- Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158>
- Rahmawati, D. (2022). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketersediaan Air Bersih Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Pendekatan Ekonomi Islam (Studi Kasus: DAK Air Minum Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo). *Repository Universitas Jambi*, 1(1), 1–7.
- Shafira, N. (2025). Implementation Regulation of the Minister of Labour No. 4 of 2022 Concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 13(1), 1–6. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1784>
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>
- Vicente-Serrano, S. M., Peña-Angulo, D., Beguería, S., Domínguez-Castro, F., Tomás-Burguera, M., Noguera, I., Gimeno-Sotelo, L., & El Kenawy, A. (2022). Global drought trends and future projections. In *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* (Vol. 380, Issue 2238). <https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0285>
- Wang, X., Chen, Y., Fang, G., Li, Z., & Liu, Y. (2022). The growing water crisis in Central Asia and the driving forces behind it. *Journal of Cleaner Production*, 378. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134574>
- Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8330>
- Yasinta, M. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyalurkan Air Bersih Di Dusun Watutena Desa Hikong Kecamatan Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. In *KENDALI: Economics and Social Humanities* (Vol. 2, Issue 1, pp. 49–62). <https://doi.org/10.58738/kendali.v2i1.320>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2025 Lutfi Nur Latipah & Erni Saharuddin. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.